

ABSTRAK

Secara Normatif adanya pergeseran kewenangan dalam pengelolaan tambang, membawa implikasi hukum yang sangat besar. Hal ini cukup terasa dalam sektor pertambangan pada Kawasan Kabupaten Sampang. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakannya untuk mengatur urusan wilayah pertambangan masih belum jelas konsepnya. Sehingga perlu disisipkannya konsep *Green Constitution* pada kebijakan yang ditetapkan, supaya walaupun ada aktivitas pertambangan di Sampang masih tetap memberikan penjaminan pada kualitas lingkungannya. Adanya pergeseran kewenangan ini bukan berarti Pemerintah Daerah Sampang lepas kendali secara penuh, sebab hal ini akan berpengaruh pada kemaslahatan Masyarakat yang ada di Sampang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Dengan metode pendekatan norma sekaligus menggunakan pendekatan kasus.

Hasil daripada penelitian ini ialah dengan membuktikan bahwa dinamika pengaturan tambang yang ada di Sampang masih belum optimal mengatasi fenomena hukum tambang ilegal. Adanya konsep *Green Constituution* memberikan gagasan muatan kebijakan yang seharusnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.

Kata Kunci : Kebijakan – *Green Constitution* – Tambang Ilegal

ABSTRACT

Normatively, there is a shift in authority in mining management, which has huge legal implications. This is quite pronounced in the mining sector in the Sampang Regency area. The Regional Government's policy in determining its policy to regulate the affairs of the mining area is still unclear in concept. So it is necessary to insert the concept of Green Constitution in the established policy, so that even though there are mining activities in Sampang, it still guarantees the quality of the environment. The existence of this shift in authority does not mean that the Sampang Regional Government is completely out of control, because this will affect the benefit of the people in Sampang.

This research is a type of normative research. With the norm approach method as well as using a case approach.

The result of this research is to prove that the dynamics of mining arrangements in Sampang are still not optimal in overcoming the legal phenomenon of illegal mining. The existence of the Green Constitution concept provides ideas for policy content that should be determined by the Regional Government of Sampang Regency.

Keywords: *Policy - Green Constitution - Illegal Mining*